



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI VI DPR RI: BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM,
BUMN, DAN INVESTASI**

Tahun Sidang	:	2017-2018
Masa Persidangan	:	V
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN atau Menteri berdasarkan surat Presiden RI No. R-44/Pres/ 09/2017 Tgl. 6 September 2017 tentang Penunjukan Sementara Menteri Perindustrian RI untuk menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI dalam rangka pembahasan terkait dengan BUMN.
Sifat Rapat	:	Terbuka
Rapat ke	:	10 (sepuluh)
Hari/Tanggal	:	Selasa, 5 Juni 2018
W a k t u	:	Pukul 10.40 s.d 15.55 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI
Ketua Rapat	:	H. Dito Ganinduto, M.B.A. (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/FPG), didampingi oleh: 1. Ir. H. Azam Azman Natawijana (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/FPD); 2. H. Inas Nasrullah Zubir, B.E., S.E. (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/F.Hanura).
Sekretaris Rapat	:	Eguh Setiawan, S.IP. (Pft. Kabag Set. Komisi VI DPR RI)
A c a r a	:	Membahas RKA dan RKP Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2019
Hadir	:	1. 27 dari 51 Anggota Komisi VI DPR RI. 2. Menteri BUMN atau Menteri berdasarkan Surat Presiden RI No. R-44/Pres/09/2017, beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN atau Menteri berdasarkan surat Presiden RI No. R-44/Pres/09/2017 dibuka pukul 10.40 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menginformasikan bahwa agenda Rapat Kerja pada hari ini dalam rangka membahas RKA dan RKP Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2019.
3. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Menteri BUMN atau Menteri berdasarkan surat Presiden RI No. R-44/Pres/09/2017 untuk menjelaskan RKA dan RKP Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2019.
4. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Anggota Komisi VI DPR RI untuk mengajukan pertanyaan/tanggapan atas penjelasan Menteri BUMN RI atau Menteri berdasarkan surat Presiden RI No. R-44/Pres/ 09/2017.

II. KESIMPULAN

1. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran dalam Pagu Anggaran Tahun 2018 sebesar Rp247.041.755.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh miliar empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).
2. Komisi VI DPR RI memahami pagu indikatif anggaran Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2019, berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Nomor: S-269/M.02/2018 dan B.209/M.PPN/D.8/KU.01.01/04/2018, tanggal 16 April 2018, sebesar Rp222.127.149.000,00 (dua ratus dua puluh dua miliar seratus dua puluh tujuh juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian alokasi anggaran per program sebagai berikut:
 - (1) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sebesar Rp141.661.292.000,00;
 - (2) Pembinaan BUMN sebesar Rp80.466.157.000,00.
3. Komisi VI DPR RI memahami usulan tambahan anggaran Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2019, sesuai surat Menteri BUMN RI Nomor S-376/MBU/06/2018 tanggal 5 Juni 2018, sebesar Rp74.000.000.000,00 (tujuh puluh empat miliar rupiah) yang akan digunakan untuk kegiatan sebagai berikut:
 - a. Kekurangan Anggaran Tunjangan Kinerja;
 - b. Penyusunan Informasi Keuangan Kombinasi BUMN 2018;
 - c. Pembangunan *Intergarated Talent Management System*;
 - d. Penyusunan Roadmap BUMN 2020-2024; dan
 - e. Pengadaan Gedung Arsip dan Data *Recovery*.Sehingga total anggaran Kementerian BUMN Tahun 2019 menjadi sebesar Rp296.127.149.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam miliar seratus dua puluh tujuh juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
4. Komisi VI DPR RI memahami target setoran dividen kepada Pemerintah dari laba BUMN yang berada di bawah pembinaan Kementerian BUMN tahun buku 2018 yaitu sebesar Rp43.640.000.000,00 (empat puluh tiga triliun enam ratus empat puluh miliar rupiah). Selanjutnya, akan dibahas dalam Panitia Kerja Dividen Komisi VI DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 15.55 WIB.